

Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata Gunung Badut dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

*Implementation of the Mount Badut Tourism
Destination Development Policy in Improving
Community Welfare*

**Erwin Nurcahyanto, Dian Suluh Kusuma Dewi,
Yusuf Adam Hilman**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Info Artikel

Diterima: 2 Februari 2025
Direvisi : 24 Maret 2025
Disetujui: 4 Juni 2025

Kata kunci:

Implementasi
Kebijakan
Kesejahteraan

Keywords:

**Implementation
Policy
Welfare**

Corresponding Author:

Yusuf Adam Hilman
adam_hilman@umpo.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian yang dilakukan ini yaitu pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi wisata Gunung Badut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pembangunan Destinasi wisata Gunung Badut Karang diharapkan dapat menjadi dampak ekonomi bagi masyarakat dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai manfaat sosial dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan pengumpulan data secara mendalam melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini berlokasi di Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan fokus penelitian ini pada implementasi kebijakan Pemerintah Desa Karang dalam Proses Pembangunan Destinasi wisata Gunung Badut Karang. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana evaluasi kebijakan dari Pemerintah Desa Karang dalam proses pembangunan di destinasi wisata gunung badut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, dukungan Pemerintah Desa, dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan selain itu, komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses implementasi kebijakan berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Abstract

The focus of the research carried out is on the implementation of the Mount Badut tourist destination development policy in improving the welfare of the community in Karang Village, Badegan District. The development of the Mount Badut Karang tourist destination is expected to have an economic impact on the community and also improve the quality of life of the community through various social and economic benefits. This research was conducted using a qualitative approach, which allows for in-depth data collection through observation, interviews and documentation techniques. This study is located in Karang Village, Badegan District, Ponorogo Regency, with the focus of this research being the implementation of Karang Village

Government policies in the Development Process of the Mount Badut Karanganyar tourist destination. This research also examines the evaluation of policies from the Karanganyar Village government in the development process at the Mount Badut tourist destination to improve community welfare and sustainable development. This research also examines supporting and inhibiting factors. Meanwhile, the research results show that community participation, Village Government support, and availability of resources are key factors in successful development. Apart from that, effective communication between stakeholders is also very important to ensure that the policy implementation process runs effectively in accordance with community expectations.

PENDAHULUAN

Perkembangan desa pasca lahirnya undang-undang desa menjadi sebuah fenomena unik, dimana peranan desa menjadi lebih luas, sehingga dapat membuat kebijakan dan menentukan arah pengembangan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, banyak sekali bermunculan desa wisata sebagai bentuk program yang dikembangkan desa untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Wisata pedesaan, dengan produknya yang unik, khas, serta ramah lingkungan, dapat menjadi solusi baru untuk pertumbuhan pariwisata di seluruh dunia. Menyikapi pergeseran minat wisatawan tersebut, bermunculan pilihan wisata baru di Indonesia berupa desa wisata di berbagai provinsi di Indonesia (Susyanti & Latianingsih, 2015) Arintoko, A., et.al 2020) (Pickel-Chevalier, S., et.al 2022).

Perkembangan desa wisata yang muncul saat ini, ibarat jamur di musim penghujan, sehingga tercatat ribuan desa wisata tercipta setiap tahunnya, sebagai sebuah *trend*. Hal ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik dan profesional.

Fenomena desa wisata juga tumbuh subur di Ponorogo sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup masyarakat secara sosial. Saat ini, sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo sedang mengalami kemajuan (Ramly, M. et.al 2016) (Kusumastuti, 2018) (Shakti, T. W., et.al 2024).

Pemerintah Desa Karanganyar bersama dengan masyarakat setempat mulai merencanakan pengembangan Gunung Badut sebagai salah satu destinasi wisata desa. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan setapak, gazebo, dan juga toilet. Berbagai kegiatan promosi dan edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata Gunung Badut. Program pengabdian kepada masyarakat dapat membantu pengembangan desa wisata, seperti pelatihan pariwisata, peningkatan kesadaran pariwisata, bantuan pengelolaan desa wisata, pelatihan promosi pariwisata, dan bantuan kelembagaan, seperti perbaikan administrasi dan kearsipan, serta bantuan kepada pengurus dan anggota. Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut Desa Karanganyar Kecamatan Badegan ini merupakan visi misi dari Kepala Desa Karanganyar, Bapak Pujiyanto yang telah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karanganyar. Diawali dari musyawarah perdusun sampai ke tingkat desa lalu daftar usulan disusun dalam bentuk RPJMDes (enam) 6 tahun dan RKPDes (satu) 1 tahun. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam menyusun RKP tersebut membutuhkan waktu setahun yang sesuai dengan perencanaan. Sumber anggaran pendapatan dan belanja desa mengawasi pendapatan desa (APBDes). Kepala Desa bertanggung jawab mengatur urusan keuangan desa. Hal ini diatur dengan

Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dengan peraturan Desa Karangon No 08 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2025 menimbang “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangon Tahun 2020-2025”.

Gunung Badut merupakan kawasan hutan lindung yang belum tersentuh oleh pariwisata, namun, potensi wisata alamnya yang indah mulai dilirik oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Karangon bersama dengan masyarakat setempat mulai merencanakan pengembangan Gunung Badut sebagai destinasi wisata. Pemerintah Desa terus menambah fasilitas-fasilitas pendukung dari tahun per tahun mulai dari gazebo kecil maupun besar, tempat pemancingan, jalan menuju puncak, tempat ngopi dan lampu unik yang ada di destinasi wisata Gunung Badut. Pemerintah Desa setiap satu bulan sekali juga mengadakan evaluasi guna meningkatkan koordinasi kepada pengelola dan memberikan pengarahan kepada pengelola. Pemerintah Desa juga terus melakukan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Rencana kedepan Pemerintah Desa melanjutkan pembangunan seperti pembuatan spot foto, penambahan gazebo-gazebo, pembuatan kolam anak-anak, area bermain anak-anak, pembuatan lahan parkir. Pemerintah desa juga menargetkan apabila pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini sudah mencapai 90% akan mulai membuat retribusi tiket masuk/parkir di area destinasi wisata tersebut. Dari segi promosi Pemerintah Desa juga mempromosikan destinasi wisata tersebut melalui media dan apabila area bermain anak-anak sudah selesai dibangun akan mengadakan

sosialisasi ke sekolah-sekolah guna meningkatkan promosi kepada khalayak umum.

Manfaat dari pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangon, dalam proses pembangunan dan juga pengelolaan Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar memiliki peranan penting. Proses pembangunan melibatkan banyak pekerja dari masyarakat sekitar, pelibatan masyarakat juga terdapat pada sektor pengelolaan seperti penjagaan kolam pemancingan, penjaga warung dan penjaga kebersihan destinasi wisata Gunung Badut tersebut.

Proses pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Sebelumnya masyarakat belum mengetahui akan adanya pembangunan destinasi wisata ini. Kemudian, masyarakat juga mengetahui untuk proses pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar memberikan sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat sekitar. Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut Desa Karangon juga memiliki kendala seperti pendanaan ke destinasi tersebut terbatas sehingga perlu banyak dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis ingin melihat bagaimana Implementasi Kebijakan pembangunan Destinasi Wisata Gunung Badut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya.

Kajian ini penting melihat banyaknya model pengembangan desa wisata dengan berbagai varian. Diharapkan melalui kebijakan pemerintah desa dapat ditemukan

model yang sesuai dengan karakteristik desa dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan (Dwiyanto, 2021). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih unit-unit tertentu dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi paling relevan atau mendalam untuk tujuan penelitian.

Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai, antara lain: Kepala Desa Karang, Ketua BUMDes Karang, Ketua panitia pengembangan Kawasan Gunung Badut, Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis). Informan tersebut dipilih karena peneliti merasa informan tau atau memahami fenomena pengembangan kawasan Gunung Badut.

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (Utami & Hayati, 2024)

Pengumpulan dan pengukuran informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan akurat tentang masalah tertentu dikenal sebagai pengumpulan data (Pakpahan et al., 2021). Selama proyek berorientasi penelitian kualitatif, reduksi data terjadi secara konsisten. Penyajian pada kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang menarik hanyalah sebagian dari satu kegiatan dalam konfigurasi yang tetap.

Tujuan dalam penelitian ini ingin menemukan model yang tepat dalam upaya pengembangan wisata desa di kawasan pedesaan, sehingga dengan adanya kajian ini

baik secara teoritis maupun praktis dapat memberikan kontribusi secara signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Kebijakan dan Tujuan

Kinerja kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn, adalah penilaian standar dan sasaran kebijakan yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan agar implementasi kebijakan menjadi efektif (Noviana et al., 2023).

Kami melakukan musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Gunung Badut, melalui beberapa tahap, yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan RT dan RW, serta BUMDes (kepala desa karangan, 2025)

Rapat pembangunan Kawasan Gunung Badut melibatkan semua pihak dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan dan juga keinginan dari semua pihak (anggota BUMDes, 2025)

Hasil penelitian di Desa Karang Kecamatan Badegan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa Karang sudah terstruktur mulai dari menjangkau aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa juga sudah melirik akan adanya potensi wisata. Setelah itu mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dimana usulan di Musyawarah Dusun (Musdus) tersebut langsung ditindak lanjuti ke Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa ingin memastikan bahwa pariwisata dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, dengan membuka akses dan tempat-tempat yang mendukung perekonomian. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebelumnya ikut berperan penting dalam pembangunan destinasi wisata. Mereka berharap pengembangan wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai aktivitas wisata. Selain itu, mereka ingin melestarikan

keindahan alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kearifan lokal.

Sumber Daya

Dalam proses penerapan kebijakan, sumber daya merupakan komponen penting yang harus diperhatikan. Implementasi kebijakan itu sendiri akan tidak efektif jika sumber daya tidak ada atau tidak optimal (Supandi, 2023).

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata Gunung Badut di Desa Karang sangat bergantung pada peran aktif dan efektif dari Pokdarwis serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Meskipun saat ini kepengurusan Pokdarwis belum berjalan optimal, pentingnya kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Desa, sistem tata kelola yang berkelanjutan, serta pemberdayaan komunitas lokal harus diutamakan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas. Diiringi dengan pengelolaan sumber daya finansial dan material yang lebih baik. Dengan demikian, strategi yang terencana dalam pengelolaan sumber daya dapat mendukung efektivitas operasional dan mendorong kebijakan dalam perencanaan serta pembangunan desa wisata (ketua Pokdarwis, 2025)

Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini masih dianggap kurang memadai. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pelatihan yang sesuai bagi SDM untuk mengelola pembangunan destinasi wisata Gunung Badut dengan efektif. Akibatnya, pemahaman tentang manajemen dan pengembangannya menjadi terbatas. Keberadaan SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan adanya tenaga yang bertanggung jawab tinggi, peralatan yang diperlukan, serta anggaran yang cukup.

Walaupun Pemerintah Desa Karang juga sudah mengirimkan orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan desa wisata yang diadakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa juga sudah memberikan pengalaman seperti studi banding ke tempat-tempat wisata desa agar mereka yang ikut studi banding bisa meniru konsep seperti destinasi wisata lainnya.

Sumber daya anggaran juga merupakan isu penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang perlu dialokasikan untuk berbagai keperluan lain, yang membuat pembagian anggaran menjadi tantangan. Anggaran berperan sebagai faktor krusial yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Keterbatasan dana dapat membatasi penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan destinasi wisata Gunung Badut, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks pembangunan destinasi wisata Gunung Badut Desa Karang ini, anggaran dibutuhkan untuk pengeboran sumur, pembuatan toren di puncak GBK dan pemasangan pipa sampai bawah GBK, pembuatan gazebo besar maupun kecil, pembentukan jalan sampai mem paving jalan GBK sampai atas, pembuatan kolam pemancingan, pembuatan warung-warung sebagai faktor penunjang dan lain lain.

Karakteristik Agen Pelaksana

Lembaga pelaksana adalah kelompok formal atau informal yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting karena kebijakan lembaga tersebut sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Jeharut et al., 2022).

Pembentukan panitia pembangunan gunung badut dan juga Pokdarwis dilakukan secara musyawarah, melibatkan semua stakeholder, bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan khususnya ketika berkegiatan di lapangan (Kepala Desa, 2025)

Pemerintah Desa Karanganyar sendiri bersama-sama dengan prinsip gotong-royong dan musyawarah mendorong pengembangan potensi di desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan desa wisata Pemerintah Desa berdasarkan keputusan musyawarah Desa dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat menyediakan anggaran melalui APBDes berdasarkan RPJMDes dan RKPDes serta rencana tata ruang desa terutama terkait dengan rancangan pembangunan.

Dalam pembangunan destinasi wisata di Gunung Badut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen semua pihak yang terlibat. Karakteristik kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan keterlibatan aktif agen pelaksana menjadi faktor penentu. Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas agen pelaksana melalui pelatihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan destinasi wisata ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Komunikasi antar Organisasi

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan sukses. Individu yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus memahami tujuan dari standar tersebut. Akibatnya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dengan cara yang seragam dan konsisten (Moerni & Darmawan, 2021).

Komunikasi antar Pemerintah Desa dan juga masyarakat bisa dikatakan berhasil dengan cara negosiasi antar orang dan sampai dibawa ke Musyawarah Dusun (Musdus) dan ditindak lanjuti di Musyawarah Desa (Musdes). Negosiasi di Desa Karanganyar

ini berjalan efektif, baik formal maupun informal, lisan atau tertulis dalam bentuk surat dan dokumen resmi atau rapat koordinasi baik internal maupun eksternal dengan pihak terkait dan lembaga eksternal. Namun ada kendala terkait komunikasi antar Pemerintah Desa dengan Pokdarwis. Permasalahan antara Pokdarwis dan Pemerintah Desa karena kurangnya koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan pembangunan Gunung Badut. Dengan ini peran Pokdarwis semakin menurun sehingga semakin lama Pokdarwis ini sampai vakum dan sampai tidak ada kegiatan atau koordinasi. Akhirnya peran Pokdarwis digantikan oleh Kepala Dusun Dilem (Kepala Desa Karanganyar, 2025).

Harapannya dari pemerintah Desa sendiri target di tahun 2026 pembangunan wisata Gunung Badut ini bisa selesai. Proses pembangunan tinggal pelengkap saja seperti spot foto, kolam renang untuk anak-anak, wahana anak-anak dan penambahan lampu-lampu yang unik sehingga wisata ini semakin lengkap bukan hanya di pagi, siang, sore saja tetapi wisata Gunung Badut ini semakin lengkap apabila adanya wisata malam juga. Dengan adanya komunikasi negosiasi kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, dapat mempengaruhi pembangunan dan selesai dengan maksimal. Selain itu, perlu selalu koordinasi dengan masyarakat untuk mendapatkan saran.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Salah satu faktor yang harus diperhatikan saat menilai keberhasilan implementasi kebijakan adalah seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat mempersulit pelaksanaan program yang efektif, sehingga upaya implementasi kebijakan membutuhkan konteks eksternal yang mendukung (Supandi, 2023).

Kondisi sosial ekonomi pada implementasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pengembangan destinasi wisata Gunung Badut Desa Karang menunjukkan bahwa kondisi ini awalnya Pemerintah Desa Karang melalui Kepala Dusun Dilem bernegosiasi kepada masyarakat sekitar dan akhirnya masyarakat sekitar menerima komunikasi dan menyetujui adanya pembangunan destinasi wisata Gunung Badut tersebut, mengingat kepala dusun terus memberikan pemahaman-pemahaman lebih kepada masyarakat sekitar terkait potensi yang ada di Gunung Badut tersebut (Kepala Desa Karang, 2025).

Seiring berkembangnya sektor pariwisata, masyarakat menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap peluang ekonomi. Mereka mulai mengembangkan usaha kecil, seperti membuka warung, sebagai sumber pendapatan tambahan di samping pekerjaan utama mereka sebagai petani. Perkembangan wisata telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata. Transformasi kawasan yang dulunya hanya berupa hutan kini telah berubah menjadi destinasi wisata. Masyarakat yang awalnya bergantung sepenuhnya pada pertanian kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha kecilnya. Masyarakat semakin terlibat dalam berbagai proses yang mendukung pengembangan pariwisata, yang berdampak positif pada perekonomian mereka.

Disposisi Sikap Pelaksana

Kemampuan pelaksana untuk menghadapi tantangan di lapangan terkait dengan disposisi sikap yang baik. Mereka yang memiliki sikap adaptif, proaktif, dan terbuka terhadap perubahan akan lebih

mampu mengatasi masalah yang kompleks dan bekerja sama dengan orang lain. Sebaliknya, sikap yang negatif, seperti tidak komitmen, apatis, atau menolak inovasi, dapat menjadi hambatan besar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pentingnya mendorong pelaksana untuk menjadi lebih produktif melalui dukungan lingkungan kerja seperti kepemimpinan yang inspiratif, komunikasi yang efektif, dan penghargaan atas pekerjaan mereka (Fitriani Abdullah & Ihlal Langunja, 2022).

Pemerintah Desa memastikan bahwa para pelaksana memiliki dedikasi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas mereka. Penunjukan petugas lapangan seperti Kepala Dusun Dilem oleh Pemerintah Desa Karang dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen dan pengalaman mereka dalam mengelola program pembangunan. Hal ini penting agar mereka dapat memahami dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Kesalahan dalam pengangkatan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan program di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas implementasi. Penunjukan kepala Dusun Dilem diangkat berdasarkan sikap Pemerintah Desa lebih mempercayai Kepala Dusun dilem karena Masyarakat sendiri lebih dekat dengan Kepala Dusun tersebut dan lebih terbuka atas aspirasi mereka. Kepala Dusun Dilem bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi proyek pembangunan destinasi wisata Gunung Badut, termasuk pengelolaan anggaran dan sumber daya. Dengan ini Kepala Dusun Dilem dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat (Kepala Desa Karang, 2025).

Pemerintah Desa Karang memiliki sikap bertanggung jawab atas keberlanjutan pembangunan Desa Wisata Gunung Badut. Dengan ini cenderung memiliki rasa

tanggung jawab terhadap tugas yang diemban dalam ranah kesejahteraan masyarakat Desa Karang dan memiliki sikap penyesuaian diri terhadap keadaan, kondisi dan perubahan yang terjadi di sekitar.

Pemerintah Desa Karang mampu mengatasi masalah serta berkolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, menciptakan komunikasi lebih lanjut lagi kepada pokdarwis agar ada tindak lanjut terhadap perubahan pengelola pokdarwis. Komunikasi juga dilakukan kepada masyarakat sekitar yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Masyarakat sekitar lebih mengetahui kondisi lingkungannya seperti apa sehingga kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sekitar perlu terjalin dengan baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata Gunung Badut

Faktor pendukung utama meliputi potensi alam yang mendukung, seperti pemandangan indah, yang dapat menarik wisatawan. Keterlibatan masyarakat sekitar juga menjadi peran penting, dimana mereka memiliki pengetahuan tentang budaya dan lingkungan setempat, serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk kebijakan yang pro-pariwisata dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas umum dapat mempercepat proses implementasi.

Faktor pendukung dapat dilihat dari beberapa pihak terkait seperti Kementerian Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia (SDM) atau partisipasi masyarakat, serta Pemerintah Desa Karang yang mengeluarkan dana berasal dari APBDes senilai kurang lebih 114 juta rupiah untuk keseluruhan biaya pembangunan Gunung Badut dari tahun 2020 sampai 2022 dan pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada

anggaran yang mengarah ke destinasi wisata Gunung Badut tersebut. Akan tetapi terdapat bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat kurang lebih sebesar 620 juta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di desa. Pemerintah Desa juga mempunyai target di tahun 2026 jika ada bantuan pendanaan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat kurang lebih sebesar 200 juta, destinasi wisata tersebut akan mencapai target 90%. Dengan memenuhi fasilitas seperti kolam renang anak-anak, area bermain anak, penambahan gazebo besar maupun kecil, penambahan lampu-lampu yang unik dan fasilitas lainnya seperti penambahan spot foto dan lain-lain.

Dari segi penghambat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kebijakan pembangunan. Meskipun pro dan kontra bukanlah hambatan definitif, hal ini tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala, terutama dalam menjelaskan manfaat dari pengembangan wisata kepada masyarakat. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi penghambat, dimana masih banyak infrastruktur seperti jalan yang perlu perbaikan. Hal ini membuat fokus anggaran yang berasal dari APBDes tidak sepenuhnya bisa diarahkan ke pengembangan wisata.

Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti peningkatan pendapatan masyarakat yang awalnya penghasilan masyarakat sehari-hari mengandalkan sektor pertanian, setelah adanya pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini masyarakat sekitar juga ikut berjualan dan terlibat dalam pengelolaan tempat wisata tersebut. Terdapat 5 warung di destinasi wisata Gunung Badut tersebut dan juga

membutuhkan tenaga pengelola kolam pemancingan. Penghasilan pedagang kurang lebih 2 juta perbulan. Selama proses pembangunan destinasi wisata Gunung Badut tersebut mayoritas yang bekerja adalah masyarakat sekitar. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atas pembangunan Gunung Badut Karangani ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bukan hanya dari kesejahteraan ekonomi saja tetapi terdapat kesejahteraan sosial seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini telah membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan pengalaman baru dengan berinteraksi dan berbagi pengalaman secara langsung kepada wisatawan. Pemerintah Desa Karangani terus berupaya meningkatkan aktivitas-aktivitas di destinasi wisata Gunung Badut tersebut seperti arisan organisasi, arisan RT maupun kegiatan lainnya. Pemerintah berharap melalui kegiatan tersebut Pemerintah Desa Karangani bisa membuat *event-event* yang dilaksanakan di destinasi wisata Gunung Badut tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan jangka panjang pembangunan ini. Melalui partisipasi aktif, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap destinasi wisata yang sedang dibangun. Namun, tantangan tetap ada dan perlu diatasi agar manfaat yang diperoleh dapat berkelanjutan. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungan dari pembangunan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat dan pengelola harus bekerja sama untuk memastikan bahwa destinasi wisata ini tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dengan mengatasi tantangan ini, destinasi wisata Gunung Badut berpotensi untuk tumbuh dan

berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karangani.

KESIMPULAN

Pembangunan destinasi wisata di Gunung Badut merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan perekonomian lokal dan melestarikan budaya setempat. Kebijakan yang jelas dan terarah diperlukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan peluang bagi masyarakat. Terdapat aspek-aspek penting dalam pembangunan Destinasi Gunung Badut Desa Karangani yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek politik. Pertama aspek ekonomi yaitu dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan pengelola destinasi wisata Gunung Badut serta pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Kedua, aspek sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program kebijakan pembangunan yang ada di destinasi wisata Gunung Badut seperti pembuatan warung serta dalam proses pembangunannya mayoritas melibatkan pekerja masyarakat sekitar. Ketiga, aspek lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Keempat, aspek politik yaitu terkait kurangnya koordinasi dengan Pokdarwis sebagai pengelola dan proses pembangunan destinasi wisata Gunung Badut. Kebijakan pembangunan tersebut dilanjutkan oleh Kepala Dusun Dilem.

Tujuan utama dari pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah Desa Karangani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan destinasi wisata Gunung Badut ini berhasil dalam implementasi kebijakan tersebut. Dibuktikan dengan segala aktivitas yang ada, seperti selama

proses pembangunan wisata ini membutuhkan pekerja yang banyak yang memberdayakan masyarakat sekitar. Pada saat wisata ini dalam proses pengerjaan hingga 60%, masyarakat juga ada yang membangun warung-warung yang ada di atas maupun di bawah Gunung Badut tersebut. Masyarakat sekitar juga berperan sebagai pengelola sehingga selain pekerjaan sehari-hari masyarakat sekitar sebagai petani, mereka sangat diuntungkan sebagai pengelola maupun pedagang di destinasi wisata Gunung Badut tersebut.

Gunung Badut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan pembangunan yang dimulai pada tahun 2019 dan mencapai 60% pada tahun 2024. Infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas umum dan area parkir sangat mendukung daya tarik kawasan ini. Pemandangan dari atas gunung yang bagus, termasuk sawah dan bukit-bukit sekitarnya menjadi daya tarik utama. Di atas gunung, terdapat toren air, warung, gazebo dan kolam pemancingan, yang semuanya meningkatkan pengalaman pengunjung.

Pengembangan destinasi wisata di Gunung Badut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama terdiri dari potensi alam yang kaya, keterlibatan masyarakat lokal, serta dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur. Komitmen pemerintah, baik di tingkat desa maupun pusat, terlihat dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan destinasi wisata. Namun, tantangan juga muncul, termasuk adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kebijakan pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah pendanaan yang menghambat perbaikan infrastruktur. Isu lingkungan juga patut diperhatikan, mengingat potensi kerusakan yang dapat terjadi akibat peningkatan jumlah pengunjung. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah strategis perlu dirumuskan untuk memaksimalkan potensi

wisata Gunung Badut dan meminimalkan hambatan-hambatan yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan. Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut di Desa Karang telah memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam hal kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam keberhasilan proyek ini, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara warga desa. Dengan berbagai aktivitas yang diadakan oleh pemerintah desa, seperti arisan dan *event-event* lainnya, diharapkan interaksi antara masyarakat dan wisatawan dapat terjalin lebih baik, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398-413.
- Dwiyanto, D. (2021). Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian. 0, 1–7.
- Fitriani Abdullah, & Ihlal Langunja. (2022). Alokasi Dana Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(2), 263–274. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i2.836>
- Jeharut, W., Setyawan, D., & Firdausi, F. (2022). *Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan*

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. 4, 11136–11149.
<http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1001>
- Kusumastuti, R. (2018). Pengaruh keberadaan Desa Wisata terhadap kesejahteraan pelaku usaha (Studi Emperis pada Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Moerni, I. S., & Darmawan, A. (2021). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) guna menunjang pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Selokuro Kabupaten Lamongan*. 1(1), 51–58.
- Noviana, F., Sasmito, C., & Widi Lestari, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong Kecamatan Wagir. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–8.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6243>
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., Purba, B., Chaerul, M., Yuniwati, I., Siagian, V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Pickel-Chevalier, S., Bendesa, I. K. G., & Putra, I. N. D. (2022). The integrated touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism?. In *Island tourism sustainability and resiliency* (pp. 262-286). Routledge.
- Ramli, M., Rinanto, Y., Ariyanto, J., Mafruhah, I., & Praseptiangga, D. (2016). Rural Tourism in Ponorogo East Java Indonesia. *Journal of Asian Vocational Education and Training*, 9, 52-66.
- Shakti, T. W., Al Ghifari, R. P., Fitri, A. M. U., & Hardjati, S. (2024). Implementation of Ngebel Lake Tourism Development as a Leading Natural Tourist Destination in Ponorogo District. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 5(1), 672-684.
- Supandi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2015). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *EPIGRAM (e-Journal)*, 11(1), 65–70.
<https://doi.org/10.32722/epi.v11i1.666>
- Utami, A. N., & Hayati, R. (2024). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. 7(2014).

